



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2337/BKKPN/TU.210/X/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2024

15 Oktober 2024

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, nomor: B.5827/DJPKRL.1/TU.210/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, perihal: Permohonan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan dokumen laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) triwulan III Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas arahan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BKKPN Kupang,

Imam Fauzi

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN 3 TAHUN 2024



BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan "Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 Tahun 2024". Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga kami harapkan adanya saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Kota Kupang,
15 Oktober 2024
Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	1
1. Kuesioner	1
2. Hasil Olah Data SKM	2
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	3
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan, sesuai dengan penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, salah satunya adalah pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi dan memberikan pelayanan masyarakat dalam penerbitan karcis masuk ataupun tanda masuk dalam berkegiatan kawasan konservasi perairan. Dalam pengelolaan tersebut, dilakukan berbagai macam kegiatan salah satunya ialah pemantauan kinerja pelayanan pada berbagai jenis layanan yang ada di lingkup BKKPN Kupang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai salah satu penyedia layanan publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan tetap maksimal. Dengan terjaganya kualitas pelayanan maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang adalah tim yang tertera dalam sesuai surat tugas “Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang” Kelompok Kerja ke-6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan nomor : B.357/BKKPN/KP.440/III/2024 pada Kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2024.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk pelaksanaan SKM menggunakan Tools Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susan KKP <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/93>, yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri secara langsung ataupun online sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan di laman Tools Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susan KKP. Dengan cara ini, penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik. Pada triwulan 3 ini dilakukan dalam jangka waktu periode Juli hingga September, Tahun 2024. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2024	8
2.	Pengumpulan Data	Juli-September 2024	90
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2024	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2024	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang berdasarkan periode survei yang akan dinilai (Juli - September). Jika mengacu dari perkiraan jumlah penerima layanan pada periode Juli - September Tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dalam kurun waktu periode tersebut adalah sebanyak 12.646 orang. Selanjutnya, responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Akan tetapi, jumlah penerima layanan pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang tidak semuanya mendapatkan pelayanan secara langsung. Pengajuan permohonan sebagian besar diajukan oleh penyedia jasa/operator kegiatan. Selain itu, pengisian survei ini bersifat sukarela sehingga jumlah sampel responden tidak dapat memenuhi jumlah populasi pada tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

Jenis layanan yang dimiliki oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang adalah Karcis Masuk Pariwisata Kawasan Konservasi, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan, dan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian. Seperti manajemen layanan di berbagai lokasi pariwisata, pemanfaat wisata di kawasan konservasi biasanya sudah dalam bentuk grup dan hanya satu orang yang melakukan akses layanan. Oleh karena itu, meskipun jumlah penerima layanan pariwisata yang tercatat di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang tinggi namun tidak seluruhnya secara sukarela berkenan dapat mengisi survei kepuasan masyarakat.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 44 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

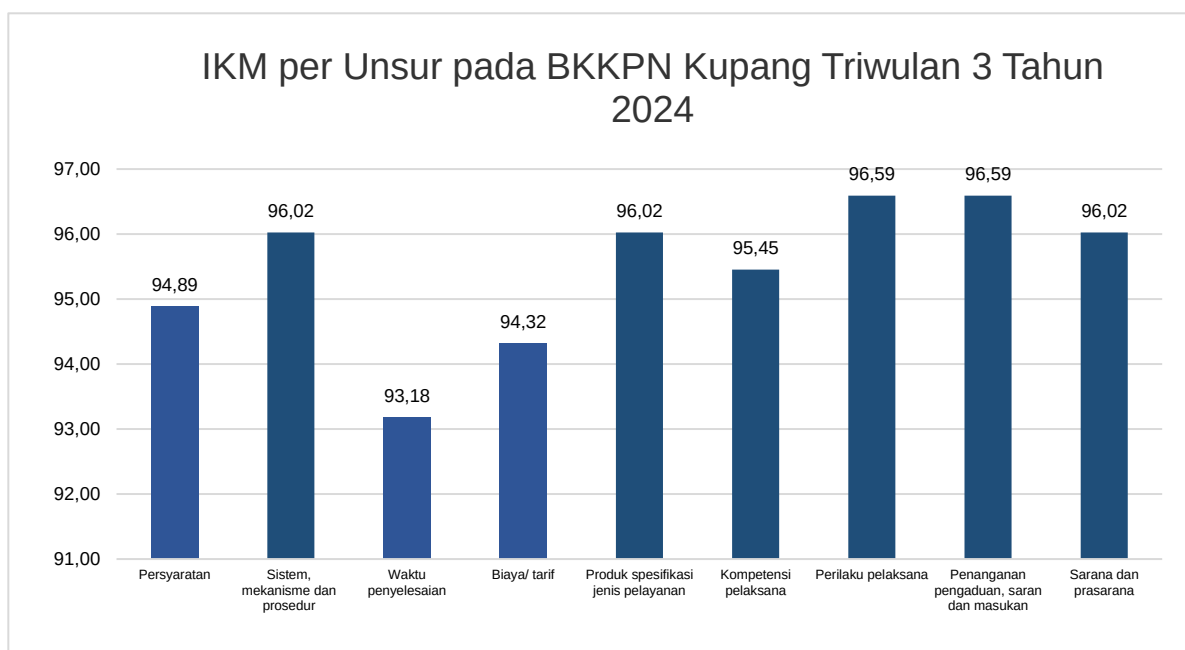
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	JENIS KELAMIN	LAKI	26	59,09
		PEREMPUAN	18	40,91
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	-	-
		SLTP	-	-
		SLTA	14	31,82
		DIII	8	18,18
		SI	19	43,18
		S2	3	6,82
		S3	-	-
3	PEKERJAAN	PNS	9	20,45
		WIRUSAHA	1	2,27
		SWASTA	10	22,73
		PELAKU USAHA	-	-
		PELAJAR	24	54,55
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN PARIWISATA	14	31,82
		LAYANAN PENDIDIKAN	18	40,91
		LAYANAN PENELITIAN	12	27,27

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	94,89	96,02	93,18	94,32	96,02	95,45	96,59	96,59	96,02
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,45 (A atau Sangat Baik)								



Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur.

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur waktu penyelesaian, biaya/tariff, dan persyaratan mendapatkan nilai terendah dengan nilai masing-masing 93.18, 94.32, dan 94.89. Mengacu pada hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelayanan.
2. Secara menyeluruh, seluruh unsur memiliki kategori nilai dengan kategori yang sama, yakni A.
3. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur perilaku pelaksana dan unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Unsur-unsur tersebut mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 96,59 dengan kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Kalo bisa lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat awam bisa jauh lebih faham”
- “untuk petugasnya sudah saangt membantu jika kami mengalamikesulitan registrasi di aplikasi , hanya saya aplikasinya sering tidak bisa digunakan (meski file yg di upload sudah dikecilkan)”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Secara menyeluruh, BKKPN Kupang mendapatkan nilai IKM dengan kategori Sangat Baik pada Triwulan 3 Tahun 2024.
- Demi mempertahankan kualitas pelayanan dan sejalan dengan saran/kritik yang diberikan, maka BKKPN Kupang akan selalu melakukan upaya perbaikan khususnya pada tiga aspek terendah dan saran/kritik yang disediakan sehingga kualitas pelayanan dapat tetap pada kualitas kategori Sangat Baik di Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa dilakukan untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikannya. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan susunan prioritas, dimulai dari unsur yang mendapatkan nilai paling rendah.

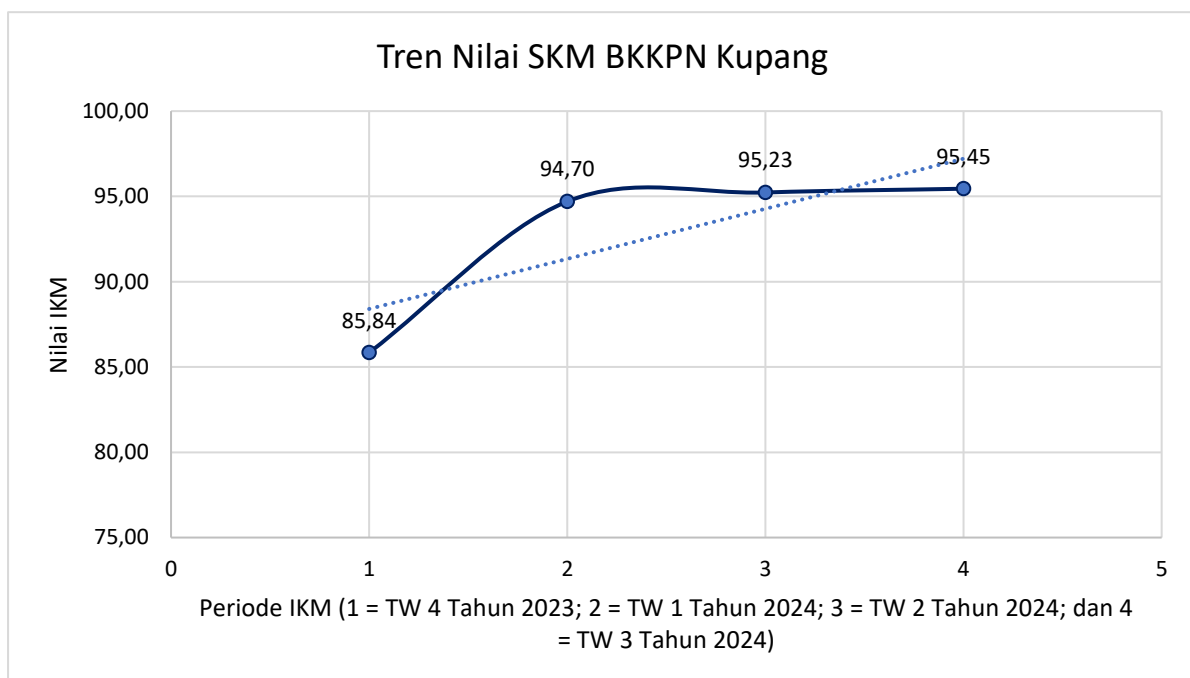
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui diskusi internal Tim Pelayanan bagian Survei Kepuasan Masyarakat pada Oktober 2024. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek 1 hingga 3 bulan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu 2024				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Biaya tarif	Rapat koordinasi untuk tindak lanjut keluhan biaya tarif yang diterapkan	V				Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Kompetensi Pelaksana	Rapat koordinasi terkait upaya peningkatan kompetensi pelaksana	V				Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3	Sarana dan Prasarana	Rapat koordinasi dengan bagian tata usaha terkait langkah peningkatan sarana dan prasarana	V				Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4	Biaya tarif	Memasukan materi diskusi biaya tarif pada Forum Konsultasi Publik Sosialisasi & Reviu Standar Pelayanan Publik 2024		V			Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5	Waktu Penyelesaian	Memasukan materi diskusi waktu penyelesaian pada Forum Konsultasi Publik Sosialisasi & Reviu Standar Pelayanan Publik 2024		V			Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6	Sarana dan Prasarana	Melaksanakan survei peningkatan kualitas pelayanan terhadap sarana dan prasarana di lingkup BKKPN Kupang melalui <i>googleform</i> Evaluasi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Balai KKPN Kupang Tahun 2024		V			Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu 2024				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
7	Sistem, mekanisme dan prosedur	Menyampaikan saran/kritik pemanfaatan layanan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait kapasitas file upload yang terlalu kecil di laman seapark.kkp.go.id			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penyebarluasan informasi kanal pengaduan untuk saran dan masukan dengan mencantumkan nomer hotline pengaduan di leaflet dan sosial media			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9	Kompetensi pelaksana	Membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik per wilker 1 orang pada laman e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10	Perilaku pelaksana	Membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik per wilker 1 orang pada laman e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11	Waktu penyelesaian	Menyebarkan informasi standar waktu pelayanan BKKPN Kupang melalui media sosial				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12	Biaya/tarif	Meninjau jumlah dan data responden yang mengeluhkan biaya/tariff pada kolom saran dalam 1 tahun periode pelayanan				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
13	Persyaratan	Meninjau jumlah dan data responden yang mengeluhkan persyaratan pada kolom saran dalam 1 tahun periode pelayanan				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan 4 Tahun 2023 hingga triwulan 3 Tahun 2024 pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga September Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dalam satu tahun secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang berubah-ubah, dimulai dengan kategori baik di triwulan 4 di Tahun 2024, lalu meningkat di triwulan berikutnya menjadi kategori sangat baik dan bertahan di kategori tersebut dengan nilai 95,45 di triwulan 3 Tahun 2024. Dengan berubahnya nilai SKM di setiap triwulan, BKKPN Kupang telah berupaya meningkatkan dan menjaga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dari waktu ke waktu, triwulan 4 Tahun 2023 hingga triwulan 3 Tahun 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan dari survei kepuasan masyarakat Triwulan ke 3 Tahun 2024 yaitu Waktu penyelesaian, Biaya/tariff, dan Persyaratan.
- Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi ialah unsur perilaku pelaksana dan unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan dengan nilai 96.59.



Kota Kupang, 15 Oktober 2024

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Kupang

(Imam Fauzi, S.S., M.Eng)

NIP. 197508302005021001

LAMPIRAN

1. Kuesioner

ptsp.kkp.go.id/skm/s/

+

24

:

Survey Kepuasan Masyarakat

Unit : Balai Kawasan

Konservasi Perairan Nasional

(BKKPN) Kupang

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Karcis Masuk Pariwisata Kawasan Konservasi

☐ Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian

☐ Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan

Data Responden

Waktu Survey

13-Oct-2024 20:01

Nama

Jenis Usaha

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirasaha Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(In a scale, how suited the requirements and the types of services)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
(In a scale, was the service requirements easy)

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
(In a scale, was the duration of the service fast)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
(In a scale, was the cost based on its regulation)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
(In a scale, Was the quality of the service good and suited on its regulation)

☐ Sangat sesuai
☐ Sesuai
☐ Kurang sesuai
☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?
(In a scale, how was the staff's competency when giving services)

☐ Sangat Cepat
☐ Cepat
☐ Kurang cepat
☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?
(In a scale, how was the staff's courtesy)

☐ Sangat Mudah
☐ Mudah
☐ Kurang mudah
☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?
(In a scale, how was our service facilities)

☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?
(In a scale, how was the online and offline complaint facilities)

☐ Sangat baik
☐ Baik
☐ Kurang baik
☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (**sikap, keterampilan dan penampilan**)

Kritik dan Saran

***) Harus diisi minimal 3 kata**

Submit Form

*) Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan **sebelum submit**

2. Hasil Olah Data SKM

Susan KKP

Dashboard

Mapping Data

Laporan

Data Detail
 Rekap per UPP per Unsur
 Rekap SKM per Layanan
 Rekap SKM per UPP
 Rekap SKM per Eselon
 Upload Laporan Movev
 Resume Laporan Movev

PAGES

Download

Profile

Logout

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKPPN) Kupang

Laporan SKM Resume

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP per Layanan

Data IKM

Triwulan 3

2024

Submit

Data Rekap per UPP per Layanan Tw 3/2024

Download Data

10 entries per page

Search...

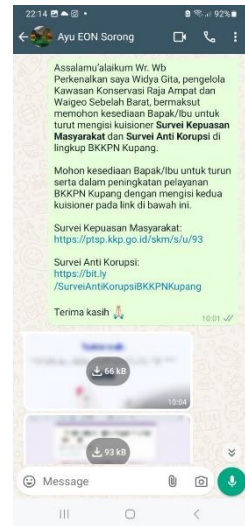
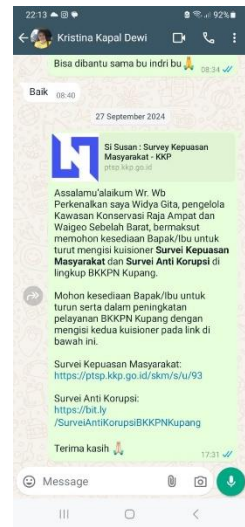
Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
djprl	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKPPN) Kupang	2024	3	Karcis Masuk Pariwisata Kawasan Konservasi	14	3.79	3.86	3.64	3.71	3.86	3.79	3.86	3.93	3.86	3.81	95.24
djprl	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKPPN) Kupang	2024	3	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan	18	3.83	3.83	3.78	3.78	3.89	3.83	3.89	3.89	3.89	3.85	96.14
djprl	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKPPN) Kupang	2024	3	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	12	3.75	3.83	3.75	3.83	3.75	3.83	3.83	3.75	3.75	3.79	94.68

Showing 1 to 3 of 3 entries

Download Data

2

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 2
Periode 2024**



**Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan, sesuai dengan penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, salah satunya adalah pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi dan memberikan pelayanan masyarakat dalam penerbitan karcis masuk ataupun tanda masuk dalam berkegiatan kawasan konservasi perairan. Dalam pengelolaan tersebut, dilakukan berbagai macam kegiatan salah satunya ialah pemantauan kinerja pelayanan pada berbagai jenis layanan yang ada di lingkup BKKPN Kupang guna meningkatkan ataupun mempertahankan kualitas pelayanan BKKPN Kupang.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai salah satu penyedia layanan publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Analisa perlu dibuatkan dan direncanakan untuk langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, laporan tindak lanjut ini disusun sebagai bukti upaya peningkatan ataupun mempertahankan kualitas pelayanan di lingkup BKKPN Kupang.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh BKKPN Kupang pada Triwulan 2 Periode April - Juni menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Triwulan 2, Periode April – Juni 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	92,08	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	98,08	A
3	Waktu Penyelesaian	98,08	A
4	Biaya/Tarif	94,23	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	95,51	A
6	Kompetensi Pelaksana	92,31	A
7	Perilaku Pelaksana	91,67	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	93,59	A
9	Sarana dan Prasarana	95,51	A

Berdasarkan data nilai yang didapat, ditemukan unsur yang memerlukan tindak lanjut karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari unsur tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			2023	2024			
			TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	
1	Kompetensi pelaksana	Pelatihan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan	V				Tim Pelayanan BKKPN Kupang
2	Perilaku Pelaksana	Pelatihan peningkatan perilaku pelaksana pelayanan	V				Tim Pelayanan BKKPN Kupang
3	Penanganan Pengaduan	Pelatihan peningkatan penanganan pengaduan	V				Tim Pelayanan BKKPN Kupang
4	Biaya tarif	Rapat koordinasi untuk tindak lanjut keluhan biaya tarif yang diterapkan		V			Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5	Kompetensi pelaksana	Rapat koordinasi terkait upaya peningkatan kompetensi pelaksana		V			Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6	Sarana dan prasarana	Rapat koordinasi dengan bagian tata usaha terkait langkah peningkatan sarana dan prasarana		V			Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7	Biaya tarif	Memasukan materi diskusi biaya tarif pada Forum Konsultasi Publik Sosialisasi & Reviu Standar Pelayanan Publik 2024			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8	Waktu Penyelesaian	Memasukan materi diskusi waktu penyelesaian pada Forum Konsultasi Publik Sosialisasi & Reviu Standar Pelayanan Publik 2024			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9	Sarana dan Prasarana	Melaksanakan survei peningkatan kualitas pelayanan terhadap sarana dan prasarana di lingkup BKKPN Kupang melalui <i>googleform</i> Evaluasi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Balai KKPNN Kupang Tahun 2024			V		Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10	Sistem, mekanisme dan prosedur	Menyampaikan saran/kritik pemanfaatan layanan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait kapasitas file upload yang terlalu kecil di laman seapark.kkp.go.id				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penyebarluasan informasi kanal pengaduan untuk saran dan masukan dengan mencantumkan nomer hotline pengaduan di leaflet dan sosial media				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12	Kompetensi pelaksana	Membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik per wilker 1 orang pada laman e-milea (<i>Electronic Millennial</i>				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

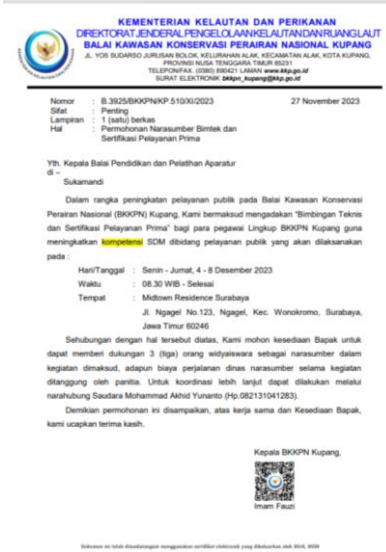
		<i>Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan					
13	Perilaku pelaksana	Membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik per wilker 1 orang pada laman e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan				V	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB III

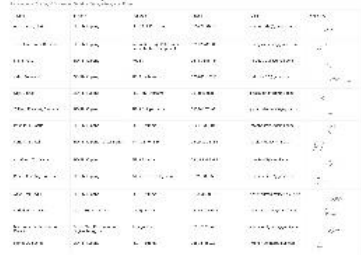
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

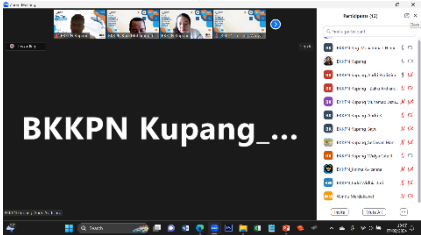
No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Pelatihan peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan	Sudah (9 November 2023)	Dilakukan Kegiatan Sharing dan Discussion Session: Budaya Pelayanan Prima untuk Pelatihan Peningkatan Kompetensi, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan secara daring melalui zoom pada internal pelayanan BKKPN Kupang.		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak semua peserta sebagai penyelenggara pelayanan bisa hadir
		Sudah (4 – 8 Desember 2023)	Diadakan “Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pelayanan Prima” bagi para pegawai Lingkup BKKPN Kupang guna meningkatkan kompetensi SDM		Tantangan yang dihadapi adalah beragamnya masalah pelayanan dari berbagai wilayah kerja membuat bimbingan

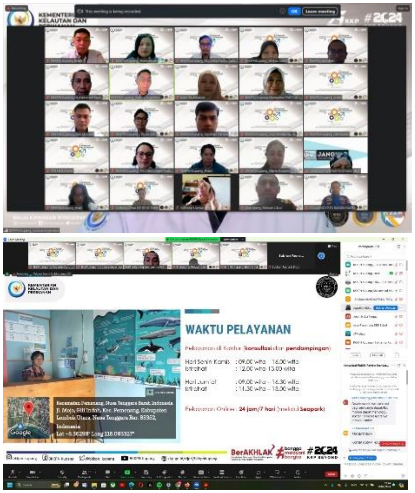
No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
			dibidang pelayanan publik unsur kompetensi	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RANGKAIAN LAUT BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 80211 TELEPON FAKS (088) 88421 LAMAR www.kkpnp.go.id SURAT ELEKTRONIK: balai_kawasan@kpnp.go.id Nomor : 8.3025/BKKPN/KP 51030/2023 Sifat : Perintah Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Narasumber Bimtek dan Sertifikasi Pelayanan Prima Yth. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di - Sukamandi Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Kami bermaksud mengadakan "Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pelayanan Prima" bagi para pegawai Lingkup BKKPN Kupang guna meningkatkan kompetensi SDM dibidang pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Senin - Jumat, 4 - 8 Desember 2023 Waktu : 08.30 WIB - Selesai Tempat : Midtown Residence Surabaya Jl. Ngagel No.123, Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60246 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memberikan dukungan 3 (tiga) orang widyaiswara sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud, adapun biaya perjalanan dinas narasumber selama kegiatan ditanggung oleh panitia. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui narasumber Saudara Mohammad Akhid Yunanto (Hp.082131041283). Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerja sama dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Kepala BKKPN Kupang,  Imam Fauzi Revisi dan/atau perubahan mengenai surat elektronik yang dibuatkan dan dikirim, BKKPN	teknis berjalan dengan pembahasan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kompetensi SDM.
2	Pelatihan peningkatan perilaku pelaksana pelayanan	Sudah (9 November 2023)	Dilakukan Kegiatan Sharing dan Discussion Session: Budaya Pelayanan Prima untuk Pelatihan Peningkatan Kompetensi, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan secara daring melalui zoom pada internal pelayanan BKKPN Kupang.		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak semua peserta sebagai penyelenggara pelayanan bisa hadir.

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
		Sudah (4 – 8 Desember 2023)	Diadakan “Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pelayanan Prima” bagi para pegawai Lingkup BKKPN Kupang guna meningkatkan kompetensi SDM dibidang pelayanan publik usur perilaku	  	Tantangan yang dihadapi adalah beragamnya masalah pelayanan dari berbagai wilayah kerja membuat bimbingan teknis berjalan dengan pembahasan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kompetensi SDM.

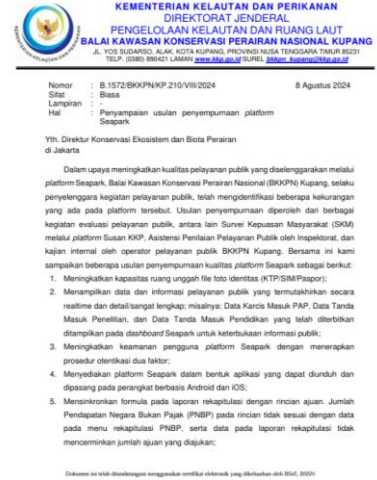
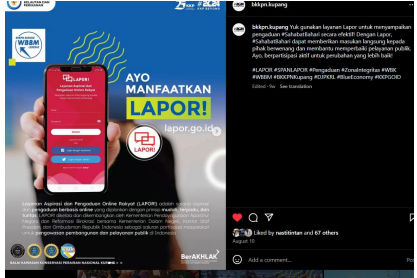
No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
3	Pelatihan peningkatan penanganan pengaduan	Sudah (9 November 2023) Sudah (4 – 8 Desember 2023)	Dilakukan Kegiatan Sharing dan Discussion Session: Budaya Pelayanan Prima untuk Pelatihan Peningkatan Kompetensi, Perilaku Pelaksana, dan Penanganan Pengaduan secara daring melalui zoom pada internal pelayanan BKKPN Kupang. Diadakan “Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pelayanan Prima” bagi para pegawai Lingkup BKKPN Kupang guna meningkatkan kompetensi SDM dibidang pelayanan publik usur penanganan pengaduan	 	Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak semua peserta sebagai penyelenggara pelayanan bisa hadir Tantangan yang dihadapi adalah beragamnya masalah pengaduan dari berbagai wilayah kerja membuat bimbingan teknis berjalan dengan pembahasan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kompetensi SDM.

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
					
4.	Biaya tarif	Sudah (7 Januari 2024)	Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk tindak lanjut keluhan biaya tarif yang diterapkan. Telah disampaikan dalam forum agar tim kerja terkait Tim Kerja Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut dapat melakukan kegiatan kerja yang berdampak pada peningkatan pada kualitas unsur biaya dan tariff.		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak secara menyeluruh tim kerja yang dapat hadir melainkan hanya perwakilannya saja.

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
5.	Kompetensi pelaksana	Sudah (7 Januari 2024)	Telah dilakukan rapat koordinasi terkait upaya peningkatan kompetensi pelaksana. Telah disampaikan dalam forum agar tim kerja terkait Tim Kerja Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut dan Tim Kerja Dukungan Manajerial/Bagain Tata Usaha dapat melakukan kegiatan kerja yang bisa meningkatkan kompetensi pelaksana.		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak secara menyeluruh tim kerja yang dapat hadir melainkan hanya perwakilannya saja.
6.	Sarana dan prasarana	Sudah (7 Januari 2024)	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan bagian tata usaha terkait langkah peningkatan sarana dan prasarana. Dalam rapat juga disampaikan harapan dalam Tim Kerja Dukungan Manajerial/Bagian Tata Usaha dapat meningkatkan kualitas pada unsur sarana dan prasarana.		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak secara menyeluruh tim kerja yang dapat hadir melainkan hanya perwakilannya saja.

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
7	Biaya tarif	Sudah (30 April 2024)	Memasukan materi diskusi biaya tarif pada Forum Konsultasi Publik Sosialisasi & Reviu Standar Pelayanan Publik 2024		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak semua peserta sebagai penyelenggara pelayanan bisa hadir
8	Waktu Penyelesaian	Sudah (30 April 2024)	Memasukan materi diskusi waktu penyelesaian pada Forum Konsultasi Publik Sosialisasi & Reviu Standar Pelayanan Publik 2024		Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan jadwal pengelolaan di kawasan konservasi sehingga tidak semua peserta sebagai penyelenggara pelayanan bisa hadir

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
9	Sarana dan Prasarana	Sudah (21 Mei 2022)	Melaksanakan survei peningkatan kualitas pelayanan terhadap sarana dan prasarana di lingkup BKKPN Kupang melalui <i>googleform</i> Evaluasi Petugas Pelayanan Publik Lingkup Balai KKNP Kupang Tahun 2024	Evaluasi Kecakapan Petugas Pelayanan Publik untuk aspek sarana prasarana pendukung pelayanan publik dapat dilihat pada Gambar 13 dibawah ini.  Gambar 13. Kebutuhan Sarana Pelayanan Publik Hasil survey terhadap Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang tertinggi adalah <i>Tablet</i> untuk memudahkan dalam sosialisasi serta pelayanan publik secara <i>mobile</i>. Selain itu usulan sarana prasarana yang paling banyak diusulkan adalah kebutuhan <i>Meubelair</i> gerai pelayanan seperti sofa/kursi dan meja pelayanan. Gerai pelayanan menetap juga diusulkan karena saat ini lokasi gerai pelayanan berpindah-pindah sehingga membingungkan pemanfaat. Dengan adanya gerai pelayanan dengan lokasi menetap maka gerai mudah diketahui oleh pemanfaat. Gerai Pelayanan diharapkan dapat memiliki fasilitas khusus disabilitas agar dapat menjangkau kelompok masyarakat rentan, selain itu terdapat kebutuhan media publikasi seperti brosur, leaflet, poster dan video promosi untuk ditampilkan pada Gerai pelayanan. Page 25	Perbedaan kegiatan antar pengelola kawasan konservasi dan daerah pengelolaan yang susah signal menyebabkan lambatnya data tsurvei erkumpul

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
10	Sistem, mekanisme dan prosedur	Sudah (8 Agustus 2024)	Menyampaikan saran/kritik pemanfaatan layanan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait kapasitas file upload yang terlalu kecil di laman seapark.kkp.go.id	 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG AL. YOS. SUDARNO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 8001 TEL. (0380) 80421 LAMAR www.kkp.go.id SUPPLI balai_kawasan@kp.go.id Nomor : B.1572/BKKPNP.210/VIU/2024 8 Agustus 2024 Sifat : Biasa Lampiran : Hal : Penyampaian usulan penyempurnaan platform Seapark Yth. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan di Jakarta Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui platform Seapark, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, selaku penyelenggara kegiatan pelayanan publik, telah mengidentifikasi beberapa kekurangan yang ada pada platform tersebut. Uraian penyempurnaan diperoleh dari berbagai kegiatan evaluasi pelayanan publik, antara lain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui platform Susan KKP, Asistensi Penilaian Pelayanan Publik oleh Inspektorat, dan kajian internal oleh operator pelayanan publik BKKPN Kupang. Bersama ini kami sampaikan beberapa usulan penyempurnaan kualitas platform Seapark sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas unggah file foto identitas (KTP/SIM/Paspor); 2. Menampilkan data dan informasi pelayanan publik yang terakumulasi secara real-time dan terintegrasi lengkap, misalnya: Data Karak Masuk PAK, Data Tanda Masuk Perizinan, dan Data Tanda Masuk Pendidikan yang telah diterbitkan ditampilkan pada dashboard Seapark untuk keterbukaan informasi publik; 3. Meningkatkan keamanan pengguna platform Seapark dengan menerapkan prosedur otentikasi dua faktor; 4. Menyediakan platform Seapark dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh dan dipasang pada perangkat berbasis Android dan IOS; 5. Menyediakan formulir pada laporan rekapitulasi dengan rincian: Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada rincian tidak sesuai dengan data pada menu rekapitulasi (PNBP), serta data pada laporan rekapitulasi tidak mencerminkan jumlah ajuan yang diajukan; (Disarankan ini tidak diselesaikan menggunakan simbolus ceklis yang diberikan oleh SKM, BKKPN)	Tidak ada tantangan/hambatan
11	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Sudah (10 Agustus 2024)	Penyebarluasan informasi kanal pengaduan untuk saran dan masukan dengan mencantumkan nomer hotline pengaduan di leaflet dan sosial media	https://www.instagram.com/p/C-fk6L0zyZ6/?img_index=4 	Tidak ada tantangan/hambatan

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
					
12	Kompetensi pelaksana	Sudah (8 Agustus 2024)	Membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik per wilker 1 orang pada laman e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG MEMORANDUM NOMOR 179/BKPPN/OT.710/VIII/2024 Yth : Petugas Pelayanan Publik BKKPN Kupang Dari : Kepala BKKPN Kupang Hal : Imbauan Pengembangan Kompetensi Pelayanan Publik Lingkup BKKPNKupang Lampiran : - Tanggal : 8 Agustus 2024 Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 2 Tahun 2024 BKKPN Kupang, bersama ini kami mengharapkan agar seluruh pelaksana tugas pelayanan publik di setiap wilayah kerja BKKPN Kupang mengembangkan aspek kompetensi dan perilaku melalui e-learning mandiri pada e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pengembangan mandiri ini dapat dilakukan pada: waktu : 12 Agustus - 12 September 2024 tempat : Secara daring di kedudukan masing-masing melalui laman web https://elearning.kkp.go.id kategori pelatihan : Teknis Umum, Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  Ditandatangani Secara Elektronik Imam Fauzi Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSSN, BSSN	Tidak ada tantangan/hambatan

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
13	Perilaku pelaksana	Sudah (8 Agustus 2024)	Membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik per wilker 1 orang pada laman e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG MEMORANDUM NOMOR 179/BKKPN/OT.710/VIII/2024 Yth : Petugas Pelayanan Publik BKKPN Kupang Dari : Kepala BKKPN Kupang Hal : Imbauan Pengembangan Kompetensi Pelayanan Publik Lingkup BKKPNKupang Lampiran : - Tanggal : 8 Agustus 2024 Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 2 Tahun 2024 BKKPN Kupang, bersama ini kami mengharapkan agar seluruh pelaksana tugas pelayanan publik di setiap wilayah kerja BKKPN Kupang mengembangkan aspek kompetensi dan perilaku melalui e-learning mandiri pada e-milea (<i>Electronic Millennial Learning</i>) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pengembangan mandiri ini dapat dilakukan pada: waktu : 12 Agustus - 12 September 2024 tempat : Secara daring di kedudukan masing-masing melalui laman web https://elearning.kkp.go.id kategori pelatihan : Teknis Umum, Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  Ditandatangani Secara Elektronik Imam Fauzi Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN	Tidak ada tantangan/hambatan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa BKKPN Kupang telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.

Kupang, 15 Oktober 2024

Kepala BKKPN Kupang



Imam Fauzi, S.S., M.Eng

NIP. 197508302005021001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti tindak lanjut terhadap unsur Sistem, mekanisme dan prosedur dengan menyampaikan saran/kritik pemanfaatan layanan pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait kapasitas file upload yang terlalu kecil di laman seapark.kkp.go.id.

Lampiran 2. Bukti tindak lanjut terhadap unsur Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dengan penyebarluasan informasi kanal pengaduan untuk saran dan masukan dengan mencantumkan nomer hotline pengaduan di leaflet dan sosial media.

Lampiran 3. Bukti tindak lanjut terhadap unsur kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana dengan membuat himbauan berupa memo untuk mengikuti Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik perwilker 1 orang pada laman e-milea (Electronic Millennial Learning) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lampiran 1



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1572/BKKPN/KP.210/VIII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian usulan penyempurnaan *platform* Seapark

8 Agustus 2024

Yth. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
di Jakarta

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui *platform* Seapark, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, selaku penyelenggara kegiatan pelayanan publik, telah mengidentifikasi beberapa kekurangan yang ada pada platform tersebut. Usulan penyempurnaan diperoleh dari berbagai kegiatan evaluasi pelayanan publik, antara lain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *platform* Susan KKP, Asistensi Penilaian Pelayanan Publik oleh Inspektorat, dan kajian internal oleh operator pelayanan publik BKKPN Kupang. Bersama ini kami sampaikan beberapa usulan penyempurnaan kualitas *platform* Seapark sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas ruang unggah file foto identitas (KTP/SIM/Paspor);
2. Menampilkan data dan informasi pelayanan publik yang termutakhirkan secara realtime dan detail/sangat lengkap; misalnya: Data Karcis Masuk PAP, Data Tanda Masuk Penelitian, dan Data Tanda Masuk Pendidikan yang telah diterbitkan ditampilkan pada *dashboard* Seapark untuk keterbukaan informasi publik;
3. Meningkatkan keamanan pengguna *platform* Seapark dengan menerapkan prosedur otentikasi dua faktor;
4. Menyediakan platform Seapark dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh dan dipasang pada perangkat berbasis Android dan iOS;
5. Mensinkronkan formula pada laporan rekapitulasi dengan rincian ajuan. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada rincian tidak sesuai dengan data pada menu rekapitulasi PNBP, serta data pada laporan rekapitulasi tidak mencerminkan jumlah ajuan yang diajukan;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

6. Mengintegrasikan kembali formula perhitungan PNBPN di Seapark dengan di Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atau Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI), terutama pada laporan Bulan Juli Tahun 2024. Telah ditemukan selisih PNBPN sebesar Rp 22.700.000,- antara data pada *platform* Seapark dengan platform SPAN/SIMPONI;
7. Meningkatkan detil tampilan data PNBPN pada SPAN/SIMPONI terkait informasi wilayah kerja yang melaksanakan, guna peninjauan yang lebih menyeluruh pada kesesuaian PNBPN antar *platform* yang digunakan;
8. Menambahkan tampilan himbauan anti gratifikasi untuk verifikator guna meningkatkan integritas, kepatuhan, dan mencegah korupsi di kalangan pelaksana pelayanan publik di lingkup BKKPN Kupang; dan
9. Menambahkan fitur notifikasi pada WhatsApp pelaksana pelayanan publik (*verifikator* dan *approver*) terkait pengajuan pemanfaatan yang masuk guna meningkatkan kualitas pelayanan prima.
10. Meningkatkan interkoneksi pembayaran melalui berbagai dompet digital, seperti QRIS, OVO, GoPay, dan metode pembayaran lainnya, dengan SIMPONI.
11. Pengembangan *platform* Seapark dibuat agar lebih ramah pengguna (*user-friendly*) dengan lebih menyederhanakan tahapan dan mempersingkat waktu layanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Direktur kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Lampiran 2

Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- Penangkapan ikan
- Pembudidayaan ikan
- Pariwisata alam perairan
- Penelitian dan pendidikan
- Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- Pemanfaatan air laut selain energi
- Transportasi perairan
- Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan

Hotline Pelayanan
Call Center

0811-3831-1708



Pengelolaan TNP Laut Sawu meliputi 10 Kabupaten di Provinsi NTT dan terbagi dalam 5 wilayah kerja yaitu Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba, dan Manggarai.

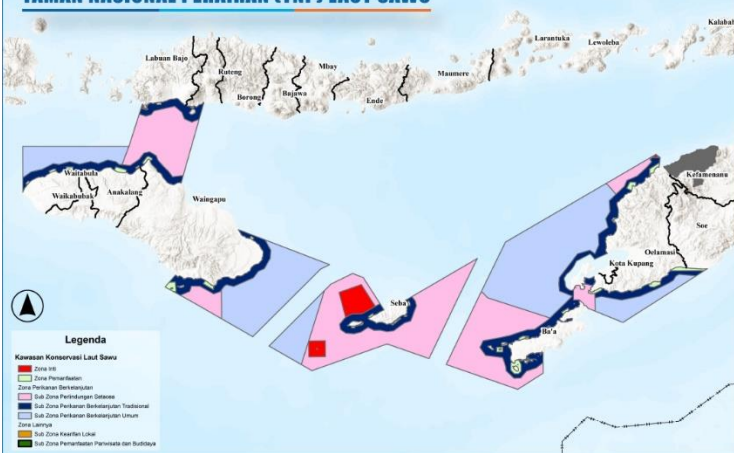
Home of the Cetacean

Habitat & Koridor Migrasi bagi
17 Spesies Mamalia Laut 6 Spesies 2 Burung Manta, Penyu, 1 Hiu Paus

KEGIATAN PEMANFAATAN SESUAI ZONASI KAWASAN KONSERVASI

KEGIATAN	ZONASI KAWASAN KONSERVASI		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN SESUAI PERUNTUKAN KAWASAN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
3. Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
5. Penelitian	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
6. Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
7. Penangkapan Ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9. Pembudidayaan ikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
11. Kegiatan pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
12. Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
14. Penempatan instalasi di laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
15. Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
16. Pembuatan foto, film, dan video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
17. Landing, take off, dan taxiing seaplane	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan

PETA KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN (TNP) LAUT SAWU



Luas keseluruhan 3.355.352,82 Ha

- Zona Inti dengan luas 79.668,2 Ha
- Zona Perikanan Berkelanjutan berupa:
 - Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional dengan luas 581.970,83 Ha
 - Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum dengan luas 1.392.858,61 Ha
 - Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Lainnya dengan luas 1.240.768,54 Ha
- Zona Pemanfaatan dengan luas 58.861,14 Ha
- Zona Lainnya berupa:
 - Sub Zona Kearifan Lokal dengan luas 768,72 Ha
 - Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budidaya dengan luas 456,36 Ha

Sejarah Penetapan Kawasan Konservasi

2009 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI/KAJANG 38 Tahun 2009 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekeliling di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI/KAJANG 38 Tahun 2014 Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekeliling di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2014 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI/KAJANG 38 Tahun 2014 Revisi Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekeliling di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014
---	---	---



Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi (EVKA)

TERUMBU KARANG
Total Area: 15.555,9 Ha
532 genera karang
Persentase tutupan: 0,53 - 73,33%

PADANG LAMUN
Total Area: 8.708,81 Ha
9 jenis lamun
Persentase tutupan: 10 - 93%

MANGROVE
Total Area: 5.781 Ha
15 jenis mangrove
Persentase tutupan: 33 - 88%

88,52
Dikalori Berkelanjutan (Kategori Emas)



KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT SAWU



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
Jl. Yos Sudarso, Gedung B, Lt. 4A, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85711
Telp: (0884) 88423 Fax: (0884) 816241 WhatsApp: 0811 3831-1708 Email: balai.konservasi@korpri.go.id

AYO MANFAATKAN LAPOR!

lapor.go.id

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis online yang dijalankan dengan prinsip **mudah, terpadu, dan tuntas**. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

BerAKHLAK

bkkpn.kupang

bkkpn.kupang Yuk gunakan layanan Lapor untuk menyampaikan pengaduan #SahabatBahari secara efektif! Dengan Lapor, #SahabatBahari dapat memberikan masukan langsung kepada pihak berwenang dan membantu memperbaiki pelayanan publik. Ayo, berpartisipasi aktif untuk perubahan yang lebih baik!

#LAPOR #SPANLAPOR #Pengaduan #ZonaIntegritas #WBK #WBBM #BKKPNKupang #DJPKRL #BlueEconomy #KKPGOID

Edited · 9w · See translation

Liked by nastitintan and 67 others

August 10

Add a comment...

Lampiran 3

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

MEMORANDUM
NOMOR 179/BKKPN/OT.710/VIII/2024

Yth : Petugas Pelayanan Publik BKKPN Kupang
Dari : Kepala BKKPN Kupang
Hal : Imbauan Pengembangan Kompetensi Pelayanan Publik Lingkup BKKPN Kupang
Lampiran : -
Tanggal : 8 Agustus 2024

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan 2 Tahun 2024 BKKPN Kupang, bersama ini kami mengharapkan agar seluruh pelaksana tugas pelayanan publik di setiap wilayah kerja BKKPN Kupang mengembangkan aspek kompetensi dan perilaku melalui e-learning mandiri pada e-milea (*Electronic Millennial Learning*) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pengembangan mandiri ini dapat dilakukan pada:

waktu : 12 Agustus - 12 September 2024
tempat : Secara daring di kedudukan masing-masing melalui laman web <https://elearning.kkp.go.id/>
kategori pelatihan : Teknis Umum, Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi